

MAHKAMAH KONSTITUSI

ALUR PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU):

ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang *Jo.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”);
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **Anggota DPR dan DPRD (“PMK 2/2023”)**;
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **Anggota DPD (“PMK 3/2023”)**;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **Presiden dan Wakil Presiden (“PMK 4/2023”)**; dan
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (“**PMK 5/2023**”).



PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD BERDASARKAN PMK 2/2023, PMK 3/2023, DAN PMK 5/2023



PARA PIHAK, OBJEK PERMOHONAN, DAN HARI KERJA PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD BERDASARKAN PMK 2/2023 DAN PMK 3/2023

Para Pihak PHPU Anggota DPR dan DPRD

A. Pemohon dan/atau Pihak Terkait:

- (1) **Partai Politik** Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD.
- (2) **Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama (dengan persetujuan Ketua Umum Partai Politik).
- (3) **Partai Politik Lokal** Peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK.
- (4) **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama (dengan persetujuan Ketua Umum Partai Lokal).

B. Termohon:

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Para Pihak PHPU Anggota DPD

A. Pemohon:

Calon Anggota DPD Peserta Pemilu

B. Pihak Terkait:

Perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

C. Termohon:

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Objek Permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD

Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

Objek Permohonan PHPU Anggota DPD

Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon.

Hari Kerja Penanganan PHPU Anggota DPR, DPRD, dan DPD

Adalah **hari kerja MK**, yaitu hari **Senin sampai dengan hari Jumat** kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

ALUR PENANGANAN PERKARA PPHU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD (PMK 2/2023, PMK 3/2023, DAN PMK 5/2023)



Pengumuman Penghitungan Suara Nasional oleh KPU

(20 Mar 2024)

**Diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU*

(1) Pengajuan Permohonan

- (a) Pencatatan dalam e-BP3 (Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik)
- (b) Penerbitan dan Penyampaian e-AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik)

(20 – 23 Mar 2024)

(2) Melengkapi & Memperbaiki Permohonan

(23 – 26 Mar 2024)

**Diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak Permohonan diajukan ke MK*

(3) Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan

(23 – 26 Mar 2024)

(4) Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan

(26 – 27 Mar 2024)

(5) Pencatatan Permohonan dalam e-BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik)

- (a) Persiapan pencatatan dalam e-BRPK, penerbitan, dan penyerahan ARPK (Akta Registrasi Perkara Konstitusi): **17 - 22 Apr 2024**
- (b) Pencatatan dalam e-BRPK dan Penerbitan ARPK: **22 Apr 2024**
- (c) Penyampaian ARPK kepada Pemohon: **22 – 23 Apr 2024**

(6) Penyampaian Salinan Permohonan Kepada KPU dan Bawaslu

(22 – 23 Apr 2024)

(7) Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait

(22 – 23 Apr 2024)

(8) Penetapan Sebagai Pihak Terkait

(23 – 24 Apr 2024)

(9) Pemberitahuan Hari Sidang Pertama

(23 – 25 Apr 2024)

(10) Pemeriksaan Pendahuluan

(26 Apr – 6 Mei 2024)

(11) Penyerahan Jawaban KPU, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu

(6 – 14 Mei 2024)

(12) Pemeriksaan Persidangan

(7 – 15 Mei 2024)

(13) Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

(15 – 17 Mei 2024)

(14) Pengucapan Putusan/Ketetapan

(20 – 22 Mei 2024)



(18) Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan

(4 – 5 Juni 2024)

(17) Pengucapan Putusan/Ketetapan

(4 – 5 Juni 2024)

(16) Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

29 Mei – 3 Juni 2024

(15) Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)

(24 – 28 Mei 2024)

**Perkara diputus paling lama 30 hari kerja, sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK*



PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN PMK 4/2023 DAN PMK 5/2023



PARA PIHAK, OBJEK PERMOHONAN, DAN HARI KERJA PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN PMK 4/2023

Para Pihak

A. Pemohon:

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

B. Pihak Terkait:

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

C. Termohon:

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

D. Pemberi Keterangan:

Bawaslu dan pihak lain yang diperlukan .

Objek Permohonan

Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memengaruhi:

- (a) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
- (b) terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Hari Kerja

Adalah hari kerja MK, yaitu hari **Senin sampai dengan hari Jumat** kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

ALUR PENANGANAN PERKARA PPHU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (PMK 4/2023 DAN PMK 5/2023)



Pengumuman
Penghitungan Suara
Nasional oleh KPU
(20 Mar 2024)

**Diajukan paling lama 3 hari
setelah penetapan hasil oleh KPU*

(1) Pengajuan Permohonan

- (a) Pencatatan dalam e-BP3 (Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik)
- (b) Penerbitan dan Penyampaian e-AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik)

(20 – 23 Mar 2024)

(2) Pencatatan Permohonan dalam e-BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik)

- (a) Persiapan pencatatan dalam e-BRPK, penerbitan, dan penyerahan ARPK (Akta Registrasi Perkara Konstitusi): **25 Mar 2024**
- (b) Pencatatan dalam e-BRPK dan Penerbitan ARPK: **25 Mar 2024**
- (c) Penyampaian ARPK kepada Pemohon: **25 Mar 2024**

(3) Penyampaian Salinan Permohonan Kepada KPU dan Bawaslu

(25 Mar 2024)

(4) Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait

(25 – 26 Mar 2024)

(5) Penetapan Sebagai Pihak Terkait, Meliputi:

- Penerbitan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait
- Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait

(25 – 26 Mar 2024)

(6) Pemberitahuan Hari Sidang Pertama

(26 – 27 Mar 2024)

(7) Pemeriksaan Pendahuluan

(28 Mar 2024)

(8) Penyerahan Jawaban dan Keterangan Para Pihak dan Pemberi Keterangan

(1 Apr 2024)

(9) Pemeriksaan Persidangan

(2 – 5 Apr 2024)

(10) Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

(8 – 15 Apr 2024)

(11) Pengucapan Putusan/Ketetapan

(16 Apr 2024)

(12) Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan

(16 Apr 2024)

**Perkara diputus paling lama 14 hari kerja, sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK*



INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
 HONORABLE COUNSEL FOR GOVERNMENT
 CONSTITUTIONAL AND LEGAL

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
 PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
 Ganjar Lukmansana, S.H., M.H.
 ANK Hakim Pidana Univ. Indonesia

SESI II
 Dr. Yusuf Husein, S.H., LL.M.
 Kepala PPATK Tahun 2002-2011
 Ketua STIR - Jakarta

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
 PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
 Prof. Desny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
 Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
 Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
 Wakil Ketua KPK (2011-2015)
 Associate Vice Integrity

KEYNOTE SPEAKER
 Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc.
 Wakil Ketua KPK Periode 2011 - 2013

HARI KE 3 - 30 SEPTEMBER 2021
 PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI V
 Fabel Dianayah, S.H.
 Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
 Irene Putri, S.H., M.Hum.
 Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain &
 Pelayanan Hukum pada Direktorat
 Pembinaan Hukum JAMADATOR KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
 Zoom Meeting
 Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
 Pukul 10.00 WIB - 13.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Sesiology Materi Legal Training
- Donorship Buku dari Pemerintah

MATERI TRAINING

SESI I

1. Memahami Tidak Polusi Korupsi Internal Korporasi
2. Memahami Tidak Polusi Perusakan yang Internal Korporasi

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Perusakan yang Internal Korporasi
2. Memahami Perjanjian dan Perjanjian Tidak Polusi Korporasi
3. Memahami Perjanjian Berkeadilan Organisasi

SESI III

1. Penemuan Good Corporate Governance bagi Perusahaan
2. Studi Kasus Implementasi Good Corporate Governance

SESI IV

1. Membangun Sistem Antikorupsi di Korporasi
2. Menemukan Perjanjian Anti Korupsi melalui Sistem Manajemen Anti Perusakan (SMAP)
3. Mengetahui Pengukuran Internal Korporasi Melalui Pengukuran WSI 303 (WSP) (WSP) (WSP) (WSP) (WSP)

SESI V

1. Pengawasan gratifikasi: orang-orang dan beban pemberian kepada public official
2. Strategi menghadapi public official yang memiliki uang hitam
3. Studi kasus

SESI VI

1. Tipologi Kasus Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
3. Studi kasus

BIAYA TRAINING
 Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
 Rp. 500.000,- Full Paket Materi (Sertifikat + Donorship Buku)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK STABARAH
 8111040000
 KCS PO INDAH WIN INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 25 September 2021
 melalui [LINK: <https://integritylawfirms.com>](https://integritylawfirms.com)

NARASUMBER Abdulhafid Zainal : 0821 2535 2688

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH
PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Desny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
 Drs. Indah Anggoro Putri, M.Bi.
 Faisal H. Bani, S.E., M.A.

MODERATOR
 Kariis, 12 Agustus 2021
 Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
 Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD1

FREE

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGENSI AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI:
UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Moh. Mahfud MD
 Wakil Ketua MKWU RI

Yuli Latief
 Ketua PDI Perjuangan

Ariad Sani
 Wakil Ketua MKWU RI

MODERATOR

Wahki Basuki
 Akademisi STIR - Jakarta

Desny Indrayana
 Vice Senior WSP
 Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
 Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD2

Tersedia e-certificate

Kami, 31 Agustus 2021
 Pukul 13.00 WIB - Selesai

Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Rampung kardi di www.integritylaw.id

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Desny Indrayana
 Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Moh. Thohari
 Pengasah Gerakan Masyarakat Indonesia

Rafly Harun
 Pakar Hukum Tata Negara

MODERATOR

Mahdi Sidiq Husein
 Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Titi Anggrah
 Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Prof. Desny Indrayana
 Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
 Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD3

Kami, 17 September 2021
 Pukul 13.00 WIB - Selesai

Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Rampung kardi di www.integritylaw.id

<https://integritylawfirms.com/indonesia/category/programs/integrity-scholarship-programs/>



<https://www.integritylawfirms.com>

We are the



INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY



**-INTEGRITY-
LAWYERS**

Jakarta Office

Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836

Melbourne Office

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708